

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KELURAHAN
BANJAR SUGIHAN**

Destan Yohanis Pote

Program Studi Ilmu Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

Abstrak

Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong transformasi digital di bidang administrasi kependudukan melalui penerapan inovasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan masyarakat secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD di Kelurahan Banjar Sugihan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Banjar Sugihan dengan subjek penelitian adalah masyarakat yang telah maupun belum menggunakan aplikasi IKD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penggunaan IKD dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pemahaman dan literasi digital masyarakat, ketersediaan fasilitas penunjang seperti smartphone dan akses internet, peran aktif aparatur kelurahan dalam sosialisasi, serta persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kemudahan penggunaan aplikasi. Diperlukan upaya peningkatan edukasi digital dan sinergi antara pihak kelurahan, Dinas Kependudukan, serta masyarakat agar tujuan transformasi digital dalam administrasi kependudukan dapat tercapai secara optimal. Komitmen dan pendekatan yang realistis sangat penting agar proses digitalisasi dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Kata kunci : Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kelurahan Banjar Sugihan.

Kata Kunci : Partisipasi, Aplikasi IKD, Kelurahan

Abstract

The field of population administration through the implementation of the Digital Population Identity (IKD) application innovation. This program aims to facilitate access to digital population administration services for the community. This study aims to determine the factors that influence community participation in the use of the IKD application in Banjar Sugihan Village. This type of research uses a qualitative descriptive approach. The location of the research was conducted in Banjar Sugihan Village with research subjects being people who have or have not used the IKD application. The data collection technique used in this study was through interview and documentation methods. The results of the study showed that community participation in the use of IKD was influenced by several factors, including the level of understanding and digital literacy of the community, the availability of supporting facilities such as smartphones and internet access, the active role of village officials in socialization, and community perceptions of the security and ease of use of the application. Efforts are needed to improve digital education and synergy between the village, the Population Service, and the community so that the goals of digital transformation in population administration can be achieved optimally. Commitment and realistic approach are very important so that the digitalization process can be accepted and implemented well by the community.

Keywords: Participation, IKD Application, Sub-district

Pendahuluan

Pada zaman digital saat ini, kemajuan teknologi dan digitalisasi mengacu pada perkembangan dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah administrasi pemerintahan. Digitalisasi adalah proses mengubah data atau informasi dari bentuk analog menjadi format digital. Digitalisasi mengonversi informasi atau data dari bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca oleh manusia menjadi format yang dapat diproses dan disimpan oleh perangkat secara digital. Digitalisasi KTP menjadikan pengelolaan identitas kependudukan menjadi efektif dan efisiensi serta dapat mempercepat proses administrasi dalam penerbitannya. Pengurangan waktu dan biaya dalam penerbitan dan pengelolaan KTP dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan strategi tersebut, komunikasi, interaksi, dan kerja sama antar pengguna layanan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menghadirkan inovasi baru untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan di Indonesia. Inovasi ini diwujudkan melalui aplikasi identitas kependudukan berbasis digital yang lebih praktis, efisien, dan fleksibel, yang dikenal dengan nama Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan informasi elektronik yang dapat diakses melalui smartphone dalam bentuk aplikasi yang menampilkan informasi terkait identitas kependudukan. Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bentuk inovasi dalam pemanfaatan teknologi serta proses digitalisasi administrasi kependudukan. Melalui aplikasi ini, data kependudukan yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk fisik berupa e-KTP kini dapat diakses secara digital. Dengan adanya IKD, masyarakat tidak lagi wajib membawa KTP fisik ke mana pun maupun membuat salinannya untuk mengurus berbagai pelayanan publik. Pada akhir tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri resmi mengumumkan rencana transformasi digital terhadap dokumen kependudukan bagi seluruh WNI pemilik e-KTP. Dari kebijakan tersebut lahirlah aplikasi IKD yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi kependudukan secara elektronik untuk berbagai kebutuhan.

Layanan IKD berfungsi sebagai sarana pencatatan dokumen kependudukan dan data pribadi penduduk yang sudah terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pusat. Sistem ini memberikan kemudahan akses informasi publik secara transparan, akurat, sekaligus tetap mengutamakan aspek keamanan dan kerahasiaan data. Aplikasi IKD dikembangkan langsung oleh Ditjen Dukcapil tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga tidak membutuhkan biaya tambahan untuk vendor maupun anggaran khusus pengembangan. Selain itu, penerapan IKD juga mampu memangkas biaya verifikasi data dalam pelayanan publik karena prosesnya tidak lagi bergantung pada pihak perantara. Dengan demikian, program IKD menjadi terobosan penting yang digagas oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Kehadiran IKD dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Program identitas kependudukan digital bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi potensi pemalsuan identitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sistem secara digital tentunya akan memberikan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat terhadap integritas data dan keabsahan dokumen. Program IKD juga dimaksudkan untuk mengikuti kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi dalam hal digitalisasi kependudukan, meningkatkan penggunaan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat, menyederhanakan dan mempercepat layanan publik atau swasta secara digital, serta menjaga keamanan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi yang efektif dalam mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 telah menetapkan aturan mengenai identitas digital yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan formulir KTP elektronik, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Menurut peraturan tersebut, identitas kependudukan digital mengacu pada informasi elektronik yang digunakan untuk mewakili dokumen kependudukan dan memuat data dalam aplikasi digital. Faktanya semakin tinggi jumlah penduduk yang wajib KTP secara otomatis akan menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan dalam proses pelayanan pembuatan KTP, seperti terbatasnya blangko E-KTP sementara kebutuhan atau pengajuan pembuatan KTP setiap hari tidak ada habisnya. Oleh karena itu munculnya inovasi Identitas Kependudukan Digital menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selaku lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penciptaan perencanaan terkait pencatatan penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta peningkatan pelayanan administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan pada paradigma positivisme. Metode ini dipilih karena mampu meneliti suatu populasi atau sampel tertentu secara sistematis, dengan teknik pengambilan sampel yang umumnya dilakukan secara acak (random sampling). Data penelitian dikumpulkan melalui instrumen penelitian yang terstruktur, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan statistik guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner/angket, panduan wawancara, maupun lembar observasi. Sebelum digunakan, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya agar hasil yang diperoleh akurat dan konsisten. Proses pengumpulan data dilakukan pada objek penelitian tertentu, baik dalam bentuk populasi maupun sampel. Untuk memperoleh temuan yang dapat digeneralisasikan, sampel yang diambil harus benar-benar mewakili populasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis menggunakan teknik statistik yang sesuai. Hasil analisis akan menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak, serta apakah temuan sejalan dengan hipotesis yang diajukan. Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah serta memberikan saran sesuai hasil temuan. Proses penelitian kuantitatif bersifat terstruktur dan berurutan, mulai dari perumusan masalah, penyusunan kerangka teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini berfokus pada pengujian pengaruh faktor sosial, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kebijakan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Banjar Sugihan.

Hasil dan pembahasan

Kelurahan Banjar Sugihan, yang terletak di Kecamatan Tandes, Surabaya Barat, merupakan kawasan urban yang aktif dan progresif dalam berbagai aspek pembangunan. Secara geografis, wilayah ini berada di pinggiran barat Kota Surabaya, menjadikannya sebagai area strategis untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi berbasis komunitas. Selain itu, Banjar Sugihan juga dikenal dengan pengembangan kampung wisata tematik yang inovatif. RW 4 di kelurahan ini telah mengembangkan berbagai kampung tematik, seperti Kampung joker (Jepang-Bali), Kampung Adinda (Apache, Indian, Dayak), Kampung UMKM, dan Kampung Melon. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui sektor pariwisata dan kerajinan tangan.

Dalam upaya pelestarian lingkungan, Banjar Sugihan telah meraih penghargaan ProKlim Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024. Penghargaan ini diberikan atas komitmen warga dalam mengembangkan ketahanan pangan melalui budidaya ikan dan tanaman sayuran, pengelolaan sampah yang efektif, serta konservasi energi dan air dengan penggunaan teknologi seperti solar cell dan lampu LED. Program Green City juga diterapkan di kelurahan ini, dengan fokus pada ekonomi sirkular dan daur ulang limbah plastik menjadi produk bernilai guna seperti dompet dan perabotan rumah tangga. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kegiatan sosial dan pendidikan juga menjadi perhatian utama di Banjar Sugihan. Melalui program Belajar Bersama Komunitas (BBK) yang melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas, kelurahan ini aktif dalam mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan kampung wisata dan UMKM. Kegiatan seperti lomba mewarnai untuk anak-anak dan pelatihan pengelolaan wisata tematik menunjukkan komitmen kelurahan dalam membangun masyarakat yang kreatif dan berdaya saing. Secara keseluruhan, Kelurahan Banjar Sugihan merupakan contoh nyata dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan, ekonomi yang inklusif, dan komunitas yang harmonis. Dengan berbagai program inovatif dan partisipatif, kelurahan ini terus berkembang sebagai kawasan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai sosial dan budaya.

Pengaruh Faktor Sosial terhadap Partisipasi Masyarakat

Faktor sosial terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD. Hal ini tercermin dari tingginya skor rata-rata (mean = 3,88) yang menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya identitas digital, dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan keluarga. Lingkungan sosial yang mendukung, seperti teman, tetangga, dan tokoh masyarakat, memiliki peran sentral dalam mendorong perilaku kolektif termasuk dalam adopsi teknologi baru. Penelitian sebelumnya oleh Safitri (2023) di Kelurahan Gunung Anyar Tambak mendukung temuan ini. Ia menyebutkan bahwa ketika lingkungan masyarakat aktif menggunakan IKD, maka terjadi efek domino yang mendorong partisipasi individu lainnya. Hal ini juga diperkuat oleh teori difusi inovasi dari Rogers (2003), yang menyatakan bahwa lingkungan sosial merupakan saluran utama dalam proses adopsi inovasi, terutama pada tahap persuasi dan keputusan. Lebih lanjut, peran keluarga dan tokoh masyarakat menjadi modal sosial yang tidak dapat diabaikan. Menurut Verhangen (1979), keterlibatan individu dalam suatu program akan meningkat bila komunitasnya turut aktif, karena hal ini menciptakan legitimasi sosial terhadap perubahan perilaku.

Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat

Faktor ekonomi, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap perangkat digital, dan biaya internet, menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap partisipasi masyarakat. Dengan skor mean sebesar 4,13, faktor ini mencerminkan kenyataan bahwa keterjangkauan secara ekonomi adalah prasyarat penting dalam adopsi teknologi digital. Temuan ini sejalan dengan Plumer (dalam Yulianti, 2012) yang menyebutkan bahwa pekerjaan dan pendapatan menentukan sejauh mana seseorang dapat berpartisipasi secara aktif, termasuk dalam kegiatan berbasis teknologi. Firmansyah dan Anisykurlillah (2023) dalam penelitian mereka di Kelurahan Kandangan menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi penghambat utama dalam aktivasi IKD, terutama bagi warga yang tidak memiliki smartphone. Selain itu, prioritas pengeluaran rumah tangga juga mempengaruhi keputusan untuk menggunakan IKD. Bagi masyarakat dengan penghasilan rendah, membeli paket data atau memperbarui gawai bukan merupakan prioritas utama. Hal ini sesuai dengan teori kebutuhan dasar Maslow, di mana kebutuhan akan keamanan dan identitas digital hanya dipertimbangkan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi.

Pengaruh Faktor Teknologi terhadap Partisipasi Masyarakat

Faktor teknologi, yang mencakup kemudahan penggunaan aplikasi, user interface, serta ketersediaan perangkat dan jaringan internet, merupakan variabel dengan skor mean tertinggi (4,36). Ini menandakan bahwa masyarakat sangat mempertimbangkan aspek teknis sebelum memutuskan untuk menggunakan IKD. Hasil ini diperkuat oleh teori Technology Acceptance Model (Davis, 1989), yang menyatakan bahwa persepsi tentang kemudahan penggunaan dan kegunaan akan sangat memengaruhi niat pengguna untuk mengadopsi teknologi baru. Penelitian oleh Widiyarta & Humaidah (2023) juga menunjukkan bahwa keterbatasan perangkat dan kurangnya kompatibilitas aplikasi menjadi kendala utama dalam implementasi IKD di Kelurahan Jepara, Kota Surabaya. User experience (pengalaman pengguna) menjadi kunci keberhasilan teknologi pelayanan publik. Bila masyarakat merasa aplikasi sulit digunakan atau tidak stabil, maka partisipasi cenderung menurun, meskipun sosialisasi dan fasilitas tersedia.

Pengaruh Faktor Kebijakan Pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat

Faktor kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh yang signifikan, dengan skor mean 4,19. Kebijakan dan tindakan pemerintah yang berupa sosialisasi, pendampingan teknis, dan integrasi layanan digital sangat memengaruhi kepercayaan dan adopsi masyarakat terhadap IKD. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Permadi & Rokhman (2023) di Kabupaten Banyumas, yang menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi secara masif untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya identitas digital. Hal ini juga sesuai dengan teori pelayanan publik berbasis e-government yang dikemukakan oleh Utomo (2012), bahwa peran negara seharusnya menjadi fasilitator bukan hanya regulator. Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam menggunakan IKD tidak hanya bergantung pada keinginan individu, tetapi juga pada strategi komunikasi pemerintah serta infrastruktur pendukung yang disediakan.

Partisipasi Masyarakat terhadap Penggunaan IKD

Partisipasi masyarakat, seperti keterlibatan dalam sosialisasi, keaktifan dalam mengikuti program pemerintah, dan kemauan untuk menggunakan layanan digital, menunjukkan pengaruh yang kuat

terhadap penggunaan aplikasi IKD. Dengan skor mean sebesar 4,29, faktor ini mencerminkan kenyataan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi identitas kependudukan digital. Bahwa capaian aktivasi IKD masih rendah karena keterbatasan pemahaman dan kurangnya strategi komunikasi yang efektif dari pemerintah. Upaya pelayanan terintegrasi, serta sosialisasi multi-kanal menjadi langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi. Sementara itu, menegaskan bahwa tingkat kesiapan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penggunaan IKD, dengan nilai koefisien determinasi mencapai 91,2%. Dengan demikian, keberhasilan implementasi IKD tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi oleh komunikasi yang efektif, edukasi yang memadai, serta dukungan infrastruktur dari pemerintah. Negara harus berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar regulator, agar transformasi digital kependudukan dapat terwujud secara optimal.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD di Kelurahan Banjar Sugihan mencakup faktor sosial, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kebijakan pemerintah. Faktor sosial memengaruhi partisipasi melalui tingkat kesadaran masyarakat, pengaruh keluarga, dan lingkungan sosial. Dukungan dari tokoh masyarakat juga terbukti menjadi dorongan positif dalam meningkatkan adopsi IKD. Faktor ekonomi meliputi pendapatan, kepemilikan perangkat digital, dan akses terhadap internet. Keterbatasan ekonomi dapat menjadi penghambat, sementara kondisi ekonomi yang lebih baik meningkatkan kemungkinan adopsi. Faktor teknologi berkaitan dengan kemudahan penggunaan aplikasi, ketersediaan jaringan internet, dan keamanan sistem. Aplikasi yang user-friendly mendorong partisipasi lebih tinggi. Faktor kebijakan pemerintah, termasuk intensitas sosialisasi, penyediaan fasilitas pendukung, dan kerja sama dengan tokoh lokal, sangat berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman dan penggunaan aplikasi IKD oleh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD di Kelurahan Banjar Sugihan masih tergolong moderat dengan kecenderungan meningkat. Berdasarkan hasil survei, sebesar 57,15% masyarakat telah menggunakan aplikasi IKD, sementara sisanya belum, dengan alasan dominan seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan akses terhadap perangkat, dan belum mendapat informasi. Namun, secara umum masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap aplikasi IKD dan bersedia menggunakan jika diberikan sosialisasi dan pendampingan yang memadai.

Referensi

- Hidayat, Anwar (2018) Pengertian simple random sampling jenis dan contoh, diakses pada tanggal 11 agustus 2025 pukul 22.06, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>.
- Safitri (2023) Partisipasi masyarakat terhadap penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital (ikd) untuk mendorong tertib administrasi kependudukan di kelurahan gunung anyar tambak <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/6870>
- Firmansyah & Anisykurlillah (2023), Efektivitas program pelayanan identitas kependudukan digital (ikd) di kelurahan kandangan kota surabaya

<http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6755>

Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS

25. Semarang : Universitas Diponegoro.

Ratnawaty (2018), Implementasi Pelayanan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bogor. 5(2), 92–106.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48874>

Trisna & Meiirinawati (2023), Analisis Penerapan Standar Pelayanan Publik Pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya. Publika, 1461–1474.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48874>